

**PAMARENTAHAN BADUY DI DESA KANEKES:  
PERSPEKTIF KEKERABATAN**

Ade Makmur K. dan Adi Purwanto  
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lemlit Unpad, Staf  
pengajar pada Jurusan Antropologi Sosial FISIP – Unpad.

**ABSTRAK**

Masyarakat Baduy cenderung bertahan dari sistem pertanian berladang berpindah. Untuk bertahan mereka diikat oleh sistem pemerintahan yang mengatur kehidupan sosio-politik dan keagamaan. Pengaturan kehidupan keseharian warga masyarakat sepenuhnya di bawah kendali sistem pemerintahan yang bersandar pada *pikukuh karuhun* yang dikenal sebagai *pamarentahan* Baduy dengan ketiga *puun* sebagai pucuk rujukan mereka yang berkedudukan di tiga daerah *tangtu*, yaitu Cibeo, Cikartawana dan Cikeusik. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mendeskripsi dan menerangkan bagaimana pranata kepemimpinan yang disimpulkan melalui *pamarentahan* Baduy berperan mengendalikan warga masyarakatnya bertahan dari pelbagai pengaruh. Pendekatan kekerabatan digunakan untuk menggambarkan penelitian ini yang dilakukan melalui pengumpulan data etnografi. Praktek kepemimpinan ketiga *puun* masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda sesuai dengan kedudukan dan perannya dalam hirarki kekerabatan. *Puun* Cibeo yang dihubungkan oleh garis keturunan yang paling muda bertindak sebagai pemimpin politik yang berperan mengatur warga masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup duniawi dan *Puun* Cikeusik yang ditentukan oleh garis keturunan yang paling tua berperan memimpin agama dalam rangka mewujudkan dan mempertahankan identitas budaya, sedangkan *Puun* Cikartawana kedudukannya di antara kepemimpinan agama dan politik.

**kata kunci:** *Pamarentahan* Baduy, Kekerabatan

**PAMARENTAHAN BADUY IN KANEKES: KINSHIP PERSPECTIVE**

**ABSTRACT**

The Baduy people nowadays still uphold the slash and burn agriculture besides their folk believes to survive amongst the modern life They were managed by such tradition like sociopolitical management that controls their attitudes. Every single daily life has been controlled by *pikukuh karuhun* tradition that already known as well as *pamarentahan* Baduy with three chiefdomains : Cibeo, Cikartawana and Cikeusik. The research has developed to describe and explained how the institution leader through *pamarentahan* objective that Baduy's roles in controlling on community. It is believed that situation could contrains outside

world influence. Ethnographic approach was used for this research to collect data. Those three *puun* leaderships have different function to control the community with its characteristics in their hierarchical kinship. *Puun* Cibeo is related to be highest kin line relation and roles as political leader to suit daily activities. *Puun* Cikeusik roles as the highest leader on folk believes to protect cultural identity. On the other hand, *Puun* Cikartawana roles as mediator of both *Puuns* as well as political and religious leader.

**Keywords :** *Pamarentahan* Baduy, Kinship

## PENDAHULUAN

Kompleksitas kepemimpinan direproduksi oleh masyarakat dalam dimensi material, psikologis dan sosial, karena berhubungan dengan tindakan dan kekuasaan. Dalam konteks itu, tindakan dan kekuasaan berfungsi mengatur kehidupan sosial yang diwujudkan oleh masyarakat melalui sikap kepatuhan dan ketaatan. Seperti diterangkan oleh Ernest Brandewie (2000), bagaimana konsep kepemimpinan pada masyarakat Hagen di Dataran Tinggi Tengah Nugini dioperasional berdasarkan kekerabatan. Atau, konsep Berthe (2000), tentang oposisi dalam sistem kekerabatan Orang Baduy yang diwujudkan dalam organisasi sosial.

Berdasarkan kedua konsep kepemimpinan dalam konteks kekerabatan tersebut, mencerminkan ketaatan dan kepatuhan pengikut menjadi pangkal utama berlangsungnya proses kepemimpinan. Sebagai imbalan dari ketaatan dan kepatuhan pengikutnya seorang pemimpin menunjukkan dirinya mampu memenuhi kebutuhan sosio-religius warga masyarakatnya.

Hubungan antara pemimpin dan pengikut dijalin melalui ikatan kekerabatan dengan merujuk pada garis keturunan yang paling tua dan garis keturunan yang paling muda dalam terminologi kekerabatan. Putaran kekerabatan serupa itu oleh Berthe disebut sebagai oposisi dalam kekerabatan yang diwujudkan dalam organisasi sosial atau pengaturan kehidupan sosio-budaya masyarakat Baduy.

Dalam konteks itu, masyarakat Baduy hingga kini masih terus bertahan dari pelbagai pengaruh luar baik agama maupun teknologi pertanian yang sederhana sekalipun. Untuk bertahan mereka diikat oleh sistem pemerintahan yang bukan hanya mengatur kehidupan sosio-politik tetapi juga keagamaan. Sistem pemerintahan modern yang ditampilkan melalui pemerintahan desa memang turut mewarnai kehidupan sosio-politik mereka.

Namun peran yang dikesankan dari keberadaan institusi tersebut sebatas sebagai penghubung dengan dunia luar, sedangkan pengaturan kehidupan keseharian warga masyarakat sepenuhnya di bawah kendali sistem pemerintahan yang bersandar pada *pikukuh karuhun* yang dikenal sebagai *pamarentahan* Baduy. Dalam *pamarentahan* itu ketiga *puun* berperan sebagai pucuk pimpinan mereka yang berkedudukan di tiga daerah *tangtu*, yaitu Cibeo, Cikartawana dan Cikeusik.

Dalam praktek kepemimpinan ketiga *puun* mempunyai fungsi yang berbeda sesuai dengan kedudukan dan peranannya masing-masing dalam hirarki keekerabatan. Dalam kedudukan ini *Puun* Cibeo berfungsi sebagai pemimpin politik yang dihubungkan oleh garis keturunan yang paling muda dan *Puun* Cikeusik berfungsi sebagai pemimpin agama yang ditentukan oleh garis keturunan yang paling tua, sedangkan *Puun* Cikartawana kedudukannya di antara kepemimpinan agama dan kepemimpinan politik. Kekuasaan agama dihubungkan dengan *karuhun* untuk mewujudkan identitas budaya, lain halnya kekuasaan politik dihubungkan dengan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup duniawi.

Bertolak dari kenyataan tersebut, penelitian ini untuk menjawab bagaimana *pamarentahan* Baduy yang didasarkan pada *pikukuh karuhun* dapat berperan mengendalikan warga masyarakat Baduy. Untuk mengungkapkan sistem *pamarentahan* dilakukan melalui pendekatan keekerabatan dengan bersandar pada syarat-syarat hirarki keekerabatan dan pengaturan perkawinan seperti yang diajukan oleh Geise (1952) dan Berthe (2000) tentang oposisi antara kakak dan adik yang dapat mewujudkan hubungan individu dalam satuan kekeluargaan.

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplanasi pranata kepemimpinan masyarakat Baduy dalam mempertahankan *pikukuh karuhun* dan mengatur serta mengendalikan warga masyarakatnya.

Berdasarkan tujuan tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya antropologi sosial yang terkait dengan pemahaman teori kepemimpinan dan keekerabatan.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Karya etnografi Baduy sejak jaman kolonial hingga kemerdekaan Indonesia telah dihasilkan para antropolog, di antaranya yang hingga kini menjadi andalan untuk para pengkaji masyarakat dan kebudayaan Baduy, adalah karya N.J.C. Geise yang tertuang dalam disertasinya, berjudul '*Badujs en Moslims in Lebak Parahiang, Zuid Banten*' (1952). Karya Judistira K. Garna, yang tertuang dalam disertasi berjudul '*Tangtu Telu Jaro Tujuh Kajian Struktural Masyarakat Baduy di Banten Selatan Jawa Barat Indonesia*' (1988), dan bukunya yang berjudul '*Orang Baduy*' (1987).

Karya etnografi yang dikemukakan oleh Geise dan Judistira Garna merupakan telaah yang mendalam pada dua jaman yang berbeda. Meski karya Geise diterbitkan tahun 1952 penelitiannya itu sendiri dilakukan pada tahun 1930-an. Artinya, penggambaran etnografi Baduy oleh Geise dalam perspektif pemerintahan kolonial berlangsung. Sedangkan, karya Judistira Garna, merupakan penggambaran masyarakat dan kebudayaan Baduy pada masa Indonesia pasca kemerdekaan termasuk di dalamnya pada masa Orde Baru

berkuasa. Tentunya, penggambaran Etnografi Garna<sup>1</sup> tidak dapat dilepaskan dari situasi Indonesia ketika itu. Nuansa pembangunan perdesaan yang diwujudkan melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa memberikan makna tersendiri bagi kehidupan Orang Baduy.

Sistem kekerabatan Orang Baduy merupakan referensi atau kerangka acuan yang penting dalam menentukan dengan siapa seorang 'ego' dapat berhubungan dan bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan seperti sosial, ekonomi dan keluarga. Kelompok-kelompok kekerabatan dalam kehidupan mereka terwujud dalam bentuk ketetanggaan ladang (*huma*), dan satuan permukiman atau kampung. Dalam konteks itu, sebuah satuan kekerabatan menguasai kehidupan sebuah *tangtu* atau kesatuan teritorial, seperti kelompok kekerabatan *tangtu* Cikeusik menguasai kesatuan kerabat Cikeusik, demikian juga *tangtu* Cibeo menguasai kesatuan kerabat Cibeo dan kekerabatan *tangtu* Cikartawana menguasai kesatuan kerabat Cikartawana.

Landasan utama berfungsinya sistem kekerabatan adalah penggunaan istilah-istilah kekerabatan. Istilah kekerabatan atau *kinship* dalam tulisan ini mengacu pada sejumlah status (posisi atau kedudukan sosial), dan saling hubungan antarstatus sesuai dengan prinsip-prinsip budaya yang berlaku (Marzali, 2000). Selanjutnya menurut Amri Marzali, prinsip hubungan kekerabatan ini terutama digunakan untuk:

- menarik garis pemisah antara kaum-kerabat (kin) dan bukan kaum-kerabat (nonkin);
- Menentukan hubungan kekerabatan seseorang dengan yang lain secara tepat;
- mengukur jauh/dekatnya hubungan kekerabatan seseorang dengan yang lain; dan
- menentukan bagaimana seseorang harus berperilaku terhadap seseorang yang lain sesuai dengan aturan-aturan kekerabatan yang disepakati bersama.

Bagi Orang Baduy prinsip tersebut, tidak dapat dilepaskan dari lokasi permukiman atau kampung tempat di mana mereka bertempat tinggal. Karena itu, menurut Garna (1987:74), hubungan kekerabatan dengan lokasi kampung dapat mengukur jauh dan dekatnya hubungan kekerabatan seseorang dengan yang lain serta bagaimana seseorang harus bertingkah laku sesuai dengan aturan-aturan kekerabatan.

---

<sup>1</sup> Sebutan yang dikemukakan Prof. Dr.R.M.Koentjaraningrat terhadap karya Prof.H.Judistira K. Garna, Ph.D. sebagai karya etnografi yang berfokus teori fungsional (Lihat Buku Baduy dari inti jagat, Bentara Budaya 1988) untuk kajian masyarakat dan kebudayaan Baduy.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi, atau cara serupa itu oleh Yunita T. Winarto (1999), disebut sebagai pendekatan prosesual untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kebudayaan. Data kebudayaan dihimpun adalah kelakuan, tata kelakuan dan hasil kelakuan pada masyarakat Baduy. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pengamatan untuk menjawab apa dan bagaimana mereka melakukan aktivitas kehidupan, sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara digunakan untuk menjawab pertanyaan mengapa mereka melakukan sesuatu itu yang terkait dengan sistem kekerabatan dalam kerangka *pamarentahan* Baduy.

Informan dalam penelitian ini, adalah mereka yang terkait dengan struktur *pamarentahan* Baduy, juga mereka yang menjadi memegang kendali religi dalam pelbagai kegiatan ritual. Selain itu, juga informan dari pemerintahan desa, seperti kepala desa (*Jaro Pamarenah*), carik desa, dan pangiwa.

Analisis data dilakukan dengan interpretasi melalui pendekatan *thick description* (Geertz, 1973; Ninuk P. Kleden, 1999). Atau disebut pula 'deskripsi mendalam' sebagai upaya pengalihan makna wacana dari wacana sosial ke dalam bentuk wacana tertulis. Proses pengalihan makna tersebut berlangsung dari suatu bentuk deskripsi simbolik berupa konsep kekerabatan yang berlaku pada masyarakat Baduy ke dalam bentuk hubungan sosial.

## **HASIL PEMBAHASAN**

Desa Kanekes adalah salah satu desa di Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Propinsi Banten, seluas 5.101,85 hektar, sebagai dataran tinggi yang bergunung dengan lembah-lembah yang merupakan daerah aliran sungai dan hulu-hulu sungai yang mengalir ke sebelah utara. Bagian tengah dan selatan desa merupakan hutan lindung atau Orang Baduy sering menyebutnya hutan *tutupan*.

Pada tahun 1888 Orang Baduy berjumlah 291 orang yang tinggal di 10 kampung, sedangkan tahun berikutnya meningkat menjadi 1.407 orang yang tinggal di 26 kampung (Jacobs, Meijer, 1891; Pennings, 1902), tahun 1928 berjumlah 1.521 orang (Tricht, 1929), kemudian tahun 1966 meningkat lagi menjadi 3.935 orang. Awal tahun 1980 penduduk Desa Kanekes menjadi 4.057 orang, sepuluh tahun kemudian berjumlah 5.600 orang dan tahun 1999 menjadi 7.000-an orang (Kartawinata, 2000). Tentunya, dari keadaan itu menuntut penyediaan lahan untuk permukiman semakin bertambah, dari pelbagai catatan dapat diketahui pertambahan jumlah kampung, seperti pada Tabel Perkembangan Kampung Baduy Tahun 1891 – 2000.

Pertambahan jumlah kampung di Desa Kanekes itu menunjukkan lahan garapan mereka semakin didesak oleh keperluan lahan untuk penyediaan permukiman. Tentunya, keadaan itu pun mengakibatkan dalam sistem perladangan mereka yang dikenal sebagai *slash and burn* lajunya semakin dipercepat dari masa 7 tahun menjadi 3 tahun pada satu lokasi *huma* yang sama

dengan percepatan penggarapan itu menimbulkan akibat tingkat kesuburan tanah semakin berkurang.

**Tabel:** Perkembangan Kampung Baduy Tahun 1891 – 2000

Tahun	Kampung			Jumlah
	Tangtu	Panamping	Dangka	
1891	3	1	5	9
1929	3	7	7	17
1952	3	21	7	31
1975	3	30	3	36
1986	3	37	3	43
1996	3	47	3	53
2000	3	50	3	56

**Sumber:** J. Jacobs dan J.J. Meijer (1891); B. van Tricht (1929); N.J.C. Geise (1952); J. Garna (1988); dan Kartawinata (2001).

**Asal Usul dan Sebutan.** Asal-usul mereka dicatat dalam ingatan dari generasi ke generasi dalam cerita tentang *karuhun*. Bagi Orang Baduy, yang melihat tentang catatan waktu ialah segala peristiwa dalam kehidupan masyarakatnya, proses waktu merupakan perjalanan riwayat dunia yang setara dengan keadaan alam semesta.

Pembakuan sebutan *Badawi*, *Badoeien*, *Badoei* dan *Bedoeis* oleh orang-orang Belanda seringkali ditunjang pula oleh laporan-laporan resmi para pejabat pemerintahan kolonial. Karena itu, ada pula kemungkinan bahwa kata *Badoeis*, *Bedoeis* dikaitkan dengan kata *badwi* kelompok masyarakat Arab yang hidup secara nomaden di gurun pasir. Namun menurut Pleyte (1909), kata Baduy tidak ada kaitannya dengan kata *Badwi*, tetapi semata-mata nama Baduy yang berasal dari kata Cibaduy, nama sungai di sebelah utara Kanekes. Itu artinya, untuk menyebut diri sendiri memang merupakan salah satu kebiasaan masyarakat Sunda menyebut nama kampung atau tempat bermukim, tempat dilahirkan atau tempat yang dapat memberikan arti penting dalam kehidupannya. Sehubungan dengan itu, tidaklah mengherankan apabila sebutan *urang* Kanekes dipakai pula oleh mereka, sebagai sebutan yang menekankan hakekat dan nilai budayanya.

**Kampung dan Ikatan Kerabat.** Untuk melihat kekerabatan orang Baduy, lokasi tempat tinggal mereka dianggap penting. Lokasi permukiman itu menentukan pada kedudukan mana terletak seseorang sebagai keturunan para Batara. Selain itu, dapat pula dipahami berbagai sistem sosial lainnya seperti perkawinan, pola tempat tinggal sesudah kawin, penempatan rumah di kampung yang dapat memberikan gambaran tentang kekerabatan dan kedudukannya dalam masyarakat.

Hubungan antara sistem kekerabatan dan lokasi kampung dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: pertama tentang kampung *tangtu*; kedua, kampung *panamping*;

dan ketiga *pajaroan*. Tentang hal itu, ekspresi orang Baduy menyatakan seluruh wilayah Desa Kanekes adalah *tangtu teulu jaro tujuh*.

Prinsip kekerabatan dalam konteks Orang Baduy sebagaimana ditunjukkan oleh N.J.C. Geise (1952), tidak menyimpang dari model klasik yang dibuat oleh van Wouden (1935), untuk beberapa masyarakat Indonesia Timur. Menurutnya, ada beberapa perubahan yang terjadi disebabkan isolasi yang dilakukan Orang Baduy sendiri. Model van Wouden berdasarkan perkawinan asimetris (*asymetric connubium*), dan garis keturunan (*double descent*) serta preferensi perkawinan antarsepupu (*cross-cousins marriage*) dengan kedudukan yang utama untuk saudara laki-laki dari pihak ibu.

Temuan Geise tentang sistem kekerabatan Orang Baduy yang sebagaimana model Van Wouden itu dibantah oleh Berthe, sebab ia menganggap bahwa model klasik yang diajukan itu hampir tidak bisa dipakai untuk menelaah kekerabatan Orang Baduy. Kalau bisa dipakai pun, seharusnya akan diperoleh sesuatu istilah untuk saudara laki-laki dari pihak ibu di dalam terminologi kekerabatan Orang Baduy. Dalam kenyataannya Geise tidak menyebutkan istilah itu. Namun begitu, Berthe berdasarkan kekerabatan Orang Baduy mengidentifikasi atas sesuatu sifat yang khas Orang Sunda, yaitu perlawanan (oposisi) antara kakak dan adik.

Dari perlawanan itu ada kecenderungan yang dianggap paling baik bagi perkawinan anak laki-laki yang pertama (kakak) dari suatu garis keturunan dengan anak perempuan yang terakhir (adik) dari garis keturunan yang lain. Kemudian hal yang dianggap penting dalam kaitan dengan ketentuan itu adalah adik tidak boleh melangsungkan perkawinan sebelum kakaknya melangsungkan perkawinan (*ngarunghal*). Dalam prakteknya pada Orang Baduy tidak terdapat perbedaan antara sepupu persamaan (*paralel-cousins*) dan antarsepupu (*cross-cousins*) (Garna, 1987), sehingga ada kecenderungan dalam perkawinan itu terjadi dalam keluarga yang paling dekat, yang menurut Berthe (2000) dapat terjadi sampai dengan sepupu tingkat keempat. Atau, istilah Orang Baduy menyebut dengan *baraya*.

**Kelompok Asal Keturunan.** Orang Baduy mengelompok menurut asal keturunan *tangtu*, yaitu keluarga luas yang tinggal dalam satu kampung. Ada 3 kelompok kekerabatan dalam kesatuan, yaitu *tangtu* Cikeusik, *tangtu* Cikartawana dan *tangtu* Cibeo. Adapun hirarki kekerabatan itu sesuai dengan urutan dari yang paling tua ke yang paling muda, yaitu Cikeusik, Cikartawana, dan Cibeo.

Seluruh Desa Kanekes terbagi dalam dua wilayah penting, yaitu wilayah *tangtu* (sakral) dan wilayah *panamping* (profan). Hal itu, berpengaruh pada pembagian warga masyarakat Baduy dalam dua paroh masyarakat, yaitu *tangtu* dan *panamping*, menentukan posisi masing-masing dalam rangka suatu kesatuan masyarakat.

Peranan untuk saling mengendalikan dan mengawasi ditentukan oleh sistem *pajaroan* yang dibentuk serta dipimpin oleh *tangtu* atau tiga *puun*. *Puun* mengangkat seorang *jaro*, yaitu tanggungan *jaro duawelas* yang bertugas mengawasi para *jaro*, terutama para *jaro* di *panamping* dan dangka.

**Pamarentahan di Kanekes.** Dalam *pamarentahan* Baduy dikenal suatu sistem pemimpin yang meliputi sejumlah pejabat dengan sebutan sendiri-sendiri.

Orientasi setiap pemimpin kepada pemimpin tertinggi, yakni para *puun*. Mereka dianggap satu kesatuan pemimpin tertinggi untuk mengatasi semua aspek kehidupan di dunia dan mempunyai hubungan dengan *karuhun*. Dalam kesatuan *puun* tersebut senioritas ditentukan berdasarkan alur kerabat bagi peranan tertentu dalam pelaksanaan adat dan keagamaan Sunda *Wiwitan*.

*Puun* memiliki kekuasaan dan kewibawaan yang sangat besar, sehingga para pemimpin yang ada di bawahnya dan warga masyarakat Baduy tunduk dan patuh kepadanya. Berdasarkan konsep itu dalam menjalankan pemerintahannya, semua lingkup dan mekanisme kekuasaan tercakup dalam tiga *tangtu* dan tujuh *jaro*.

Dengan demikian, bagi orang Baduy seorang pemimpin dalam *pamarentahan* (*jaro*, *girang seurat*, *tangkesan kokolotan*, *kokolot*, dan *baresan*), berasal dari keturunan para *puun* yang artinya, satu sama lain terikat oleh garis kerabat. Dalam konteks itu, ciri penting dalam *pamarentahan* Baduy, terletak pada diferensiasi peran dan pembagian jabatan yang terpisahkan melalui struktur sosial, namun semuanya terikat oleh satu hubungan kerabat yang erat.

Perbedaan peran yang mendasar antara para pemimpin yang disebut *puun* dan yang disebut para *jaro*, adalah pada tanggung jawab yang berurusan dengan aktivitasnya, karena para *puun* berurusan dengan dunia gaib sedangkan para *jaro* bertugas menyelesaikan persoalan duniawi. Atau, dengan perkataan lain, para *puun* berhubungan dengan dunia sakral dan para *jaro* berhubungan dengan dunia profan. Oleh karena itu, para *puun* menerima tanggung jawab tertinggi pada hal-hal yang berhubungan dengan pengaturan harmonisasi kehidupan sosial dan religius, sehingga kehidupan warga masyarakatnya dapat berlangsung dengan tertib.

Dalam situasi seperti itu warga masyarakat dituntut patuh memenuhi ketentuan *pikukuh* yang telah digariskan para *karukun*. Pelanggaran terhadap *pikukuh* berarti telah siap menerima hukuman berupa pengusiran dari daerah *tangtu*. Atau, bagi masyarakat *panamping* melanggar ketentuan itu berarti harus menanggung kewajiban bekerja di huma *puun*, yang lamanya disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran.

Dalam *pamarentahan* Baduy, dimulai dari lingkungan rumah, yakni seorang kepala keluarga inti mengatur kehidupan para anggota keluarganya, termasuk pengawasan sosial terhadap aturan adat. Urusan dan pengaturan yang dilakukannya ialah membina kehidupan keluarga intinya, berhuma, hubungan dengan kaum kerabat, melakukan perhitungan untuk menentukan saat mulai menanam, bepergian, menyelenggarakan perkawinan, pengasuhan, pendidikan anak dan turut serta dalam berbagai upacara.

Pada tingkat kampung ada beberapa jenis pemimpin. Di dangka terdapat seorang pemimpin adat dan agama yang disebut *jaro* dangka. Ia meneruskan dan mengawasi ketentuan *karuhun* yang disampaikan melalui *puun*, dan ia juga dapat berkumpul di *tangtu* dalam upacara keagamaan. Selain itu, *jaro* dangka diharuskan turut serta dalam upacara membersihkan *tangtu* dari dosa yang ditinggalkan oleh si pelanggar.

Itu artinya, dalam *pamarentahan* Baduy, ada dua orang yang dituakan dalam kampung *panamping* namun berfungsi berbeda, yaitu: pertama, *kokolotan*

*lembur*. Yang menjadi pemimpin *pikukuh*. Ia bertugas atas nama *puun* untuk mengawasi, mengatur, dan melaksanakan ketentuan *puun*. Kedua, *kokolot lembur* yang kedudukannya sejajar dengan ketua rukun kampung dalam sistem pemerintahan formal.

Pemimpin *tangtu* adalah *jaro tangtu*. Ia bertugas sebagai *kokolotan lembur* dan sekaligus pula bertindak sebagai *kokolot lembur*. Selain itu, ia pun harus turut serta *seba* ke ibukota kabupaten di Rangkasbitung dan keresiden Banten yang kini menjadi Gubernur di Serang.

*Jaro tangtu* diangkat menurut alur keturunan dari para *jaro* terdahulu, yang disiapkan oleh *pikukuh* langsung di bawah *tangkesan* dan pengawasan *puun*. Apabila calon *jaro tangtu* dianggap siap, walaupun ia masih muda, ia dapat diangkat.

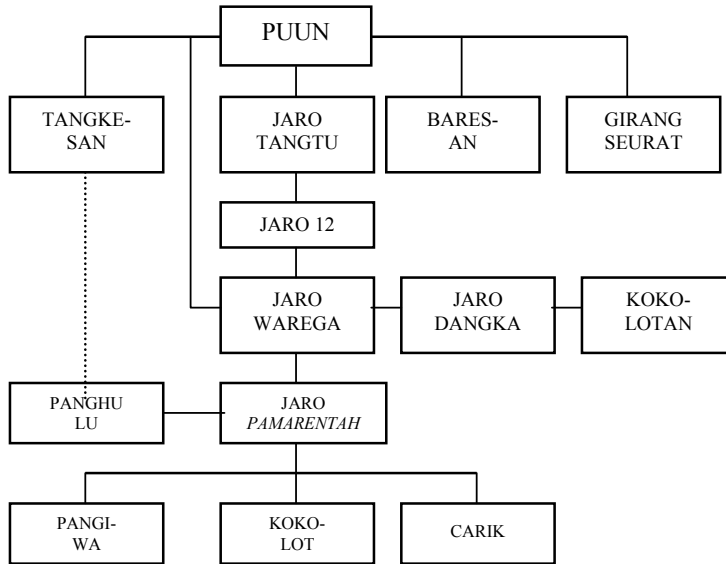
Dalam *pamarentahan* Baduy, istilah *jaro* banyak digunakan. Arti kata *jaro* sendiri adalah ketua kelompok atau pemimpin. Pada tingkat *panamping* terdapat seorang *jaro* yang tidak hanya mengurus dan mengatur seluruh *jaro*, tetapi juga berkuasa mutlak sebagai pengawas serta pelaksana tertinggi *pikukuh* di *panamping*. Dari keduabelas *jaro*, yaitu tiga *jaro tangtu*, tujuh orang *jaro dangka*, seorang *jaro warega*, dan seorang *jaro pamarentah*, maka ia adalah koordinator kerja para *jaro* yang dalam *pamarentahan* Baduy dikenal dengan sebutan *jaro duawelas*. *Jaro warega* berperan dalam upacara keagamaan, terutama untuk persiapan dan pelaksanaan *seba*, tetapi pada posisi pimpinan dalam Sunda *Wiwitan*, ia adalah pembantu utama tanggungan *jaro duawelas*.

*Jaro pamarentah*, adalah *jaro Kanekes*, kepala desa yang pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak, para *puun* dan pemerintah daerah. Acuan ke atas juga dua yaitu *puun* dan camat. Karena itu seorang *jaro pamarentah* merupakan pengimbang di antara kedua kategori pemimpin itu, yang dengan penuh kebijaksanaan harus mampu melaksanakan semuanya. Masa kerja seorang *jaro pamarentah* tergantung dari lamanya dan sejauh mana ia mampu melaksanakan kebijaksanaan pengimbang dimaksud. *Jaro pamarentah* dibantu oleh paling tidak tiga orang pembantu utama, yaitu carik adalah juru tulis desa yang selalu berasal dari luar Kanekes, dan dua orang *pangiwa*, pembantu *jaro pamarentah* yang berasal dari *panamping*.

Pada tingkat *tangtu* terdapat tiga *puun*, yang tidak hanya menjadi pemimpin agama dan adat tertinggi di kampung *tangtu*, tetapi juga untuk seluruh Kanekes. Semua pemimpin bawahan termasuk *jaro pamarentah* harus tunduk kepada mereka. *Puun* dalam menjalankan aktivitasnya dibantu oleh sejumlah pejabat adat dan agama. Pejabat adat dan agama tertinggi yang berfungsi sebagai penasihat ialah *tangkesan* yang juga disebut dukun putih. Ia biasanya berasal dan berkedudukan di kampung Cikopeng. Dukun-dukun pada tingkat kampung lainnya selain berada di bawah pengawasan *puun* juga diamati oleh *tangkesan*.

*Puun* mempunyai staf yang lengkap, seperti *seurat* atau *girang seurat* yang menjadi pembantu *puun* untuk berbagai hal. Jabatan *seurat* hanya ada di Cikeusik dan Cibeo, tetapi tidak ada di Cikartawana. *Jaro tangtu* membantu *seurat* dan *puun* secara langsung. Penyampaian berita dan lain-lainnya dilakukan oleh pembantu umum. Jumlahnya tergantung dari kekerapan kerja, upacara dan

pelaksanaan *pikukuh*. Semacam dewan penasihat *puun* terdapat di setiap kampung *tangtu*, yang disebut *baresan* (barisan, dewan atau kumpulan) atau sering disebut *baresan salapan*, karena terdiri dari sembilan orang tokoh, termasuk *jaro tangtu*, seurat dan lainnya. Fungsi *baresan* adalah membantu *puun* dan *jaro tangtu* memecahkan berbagai masalah dan melaksanakan *pikukuh*.



**GAMBAR:** STRUKTUR *PAMARENTAHAN* BADUY

Dengan demikian seorang *puun* didukung oleh penasihat batin melalui *tangkesan* dan penasihat pelaksanaan *pikukuh* oleh *baresan salapan*. Pengawasan para *puun* mampu menjangkau wilayah dan seluruh warga Kanekes melalui tanggungan *jaro duawelas* dan dukun-dukun *lembur* serta *kokolotan lembur*.

Dalam konteks itu, *pamarentahan* Baduy berfungsi untuk mensucikan dan membuat tapa dunia, termasuk memelihara alam sebagai pusat dunia, sedangkan dunia beserta isinya dijaga oleh keturunan muda, dan sultan-sultan Banten yang harus membuat dunia ramai. seorang pemimpin agama dihubungkan dengan garis keturunan yang paling tua, sedangkan seorang pemimpin politik dihubungkan dengan garis keturunan yang paling muda. Kekuasaan agama dihubungkan dengan para leluhur atau *karuhun* dan kekuasaan politik dihubungkan dengan aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu artinya, seorang pemimpin agama mewujudkan identitas masyarakat Baduy, sedangkan seorang pemimpin politik mengurus kehidupan duniawi termasuk mengurus dan memelihara kelestarian tanah.

Untuk melangsungkan aktivitasnya itu, kegiatan duniawi dipusatkan di *tangtu* Cibeo, sedangkan aktivitas keagamaan berada di *tangtu* Cikeusik. Namun *tangtu* dalam menjalankan aktivitasnya itu saling menyokong dan sekaligus saling terikat. Karena diantara keduanya saling memberikan pengaruh untuk mengokohkan tradisi Baduy yang bersandar pada *pikukuh karuhun*, yaitu: '*nu lain kudu dilainkeun, nu enya kudu dienyakeun, nu ulah kudu diulahkeun*'. Artinya, yang bukan harus dikatakan bukan, yang benar harus dikatakan benar dan yang dilarang harus dikatakan dilarang.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa dalam *pamarentahan* Baduy seorang pemimpin dipilih dari kelompok keluarga tertentu yang memang telah memiliki alur keturunan pemimpin, sekalipun demikian bukan berarti masyarakat menyerahkan rekrutmen kepemimpinan kepada keberuntungan atau nasib. Jadi rekrutmen kepemimpinan dalam hirarki *pamarentahan* Baduy diambil dari bagian sangat kecil dari seluruh warga masyarakat.

Usia dalam penentuan pemimpin tidak menjadi hal yang utama atau menjadi penghalang seseorang untuk menjadi seorang pemimpin. Ukuran utama yang menjadi sandaran adalah setiap individu Orang Baduy cenderung menilai setinggi mungkin keluarga dan garis keturunan pemimpin.

Dalam konteks itu, kelompok-kelompok keturunan satu garis kekerabatan (*unilineal*), menawarkan proposisi, bahwa struktur politik dalam *pamarentahan* Baduy selalu stabil dan dalam banyak hal persaingan internal yang mungkin timbul dari perpecahan di antara garis-garis keturunan dapat dihindarkan dengan adanya pembagian kewenangan yang didasarkan atas ikatan-ikatan kewilayahan yang berkoeksistensi dengan hubungan-hubungan kekeluargaan.

Strategi dalam *pamarentahan* Baduy untuk melanggengkan kekuasaan dan kestabilan tradisi yang berpijak pada *pikukuh* didasarkan landasan afiliasi kekeluargaan dan ikatan-ikatan kewilayahan. Dalam *pamarentahan* serupa ini, struktur yang dibentuk semata-mata untuk menegakkan ketertiban sosial agar penguatkan ikatan wilayah lebih erat. Pemisahan yang berlangsung hanya sebatas kewilayahan (kampung-kampung), namun pemisahan itu kemudian tercakup oleh sistem pertalian keluarga yang kuat.

Peranan ketiga *puun* dan *jaro* tujuh yang terlingkup dalam sistem kekerabatan pada dasarnya berhubungan dengan sentralisasi kewenangan. Oleh karena itu, sebagai penutup tulisan ini dapat dinyatakan bahwa suatu sistem kekerabatan yang kuat, sementara hal-hal lainnya setara, berkorelasi dengan suatu sistem politik yang lemah mewujudkan spesialisasi kewenangan yang terpusat di kampung *tangtu*, baik spesialisasi keagamaan maupun politik, seperti ditunjukkan oleh peranan *puun* Cikeusik dan *puun* Cibeo untuk mengekalkan keyakinan Sunda *Wiwitan* bagi masyarakatnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Brandewie, E. 2000. Tempat Orang Besar dalam Masyarakat Hagen Tradisional di Dataran Tinggi Tengah Nugini. Dalam Frank McGlynn dan Arthur Tuden. 2000. *Pendekatan Antropologi pada Perilaku Politik*. Terjemahan Suwargono dan Nugroho. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Hal. 85 – 112.
- Berthe, Louis. 2000. *Kekerabatan, Kekuasaan dan Cara Berproduksi*. Terjemahan Judistira K. Garna. Bandung: Primaco Akademika.
- Danasasmita, Saleh dan Anis Djatisunda. 1985. Kehidupan Masyarakat Kanekes. Bandung Proyek Sundanologi, Dep. Pendidikan & Kebudayaan R.I.
- Eggan Fred. 1966. *The American Indian*. Chicago.
- Frank McGlynn dan Arthur Tuden. 2000. *Pendekatan Antropologi pada Perilaku Politik*. Terjemahan Suwargono dan Nugroho. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Garna, Judistira K. 1987. *Orang Baduy*. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Garna, Judistira K. 1988. *Tangtu Telu Jaro Tujuh Kajian Struktural Masyarakat baduy di Banten Selatan Jawa Barat Indonesia*. Tesis Ph.D. Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Geertz, C. 1973. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Geise, N.J.C. 1952 *Badujs en Moslims in Lebak Parahiang, Zuid Banten*. Disertasi. Leiden.
- Jacobs, J. dan J.J. Meijer. 1891. *De Badoeij's*. 's-Gravenhage: Martionus Nijhoff.
- Kartawinata, A.M. 2001. Pamarentahan Baduy di Kanekes. Makalah Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia. Padang: UI-Universitas Andalas, 18 – 20 Juli.
- Ninuk P. Kleden. 1999. Metode Pemahaman bagi Penelitian Antropologi. Dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*. Th. XXIII, No. 60. Sept – Des. Jakarta: Universitas Indonesia-Yayasan Obor Indonesia. Hal. 36 - 49.
- Marzali, Amri. 2000. Dapatkah Sistem Matrilinear Bertahan Hidup di Kota Metropolitan?. Dalam *Antropologi Indonesia*. Th. XXIV, No. 61 Jan-Apr. Jurusan Antropologi FISIP – Universitas Indonesia. Hal. 1 – 15.
- Pleyte, C.M. 1910. *Badoejsche geesteskinderen*. Tijdschrift voor Bataviaschap, deel 54, afl. 2, 3-6.
- Yunita T. Winarto. 1999. Pendekatan Prosesual: Menjawab Tantangan dalam Mengkaji Dinamika Bdaya. Dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*. Th. XXIII, No. 60. September–Desember .Jakarta: Universitas Indonesia-Yayasan Obor Indonesia. Hal. 25-35.